

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana aktivitas ekonomi di suatu wilayah mengalami perkembangan. Terbentuknya pendapatan dapat dilihat dari konsep Fungsi Produksi Cobb-Douglas, yang menjelaskan bahwa *output* dihasilkan melalui kombinasi berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal, serta didukung oleh kemajuan teknologi. Dalam hal ini, kemampuan mengelola dan memanfaatkan faktor-faktor tersebut secara efisien menjadi kunci dalam menentukan besarnya *output* yang dapat dihasilkan oleh suatu usaha (Grossman & Oberfield, 2022).

Namun, *output* yang telah diproduksi belum memiliki nilai ekonomi apabila belum melalui proses penjualan di pasar. Berdasarkan Teori *Revenue*, pendapatan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam memasarkan produknya sesuai dengan harga yang berlaku. Artinya, pendapatan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan dalam proses produksi, tetapi juga oleh efektivitas strategi penjualan (Pindyck dan Rubinfeld 2018).

Dalam konteks Indonesia, kerangka ini relevan untuk memahami perkembangan Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Kalimantan, yang sangat bergantung pada produktivitas tenaga kerja serta pemanfaatan teknologi, khususnya internet, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IMK juga memiliki karakteristik fleksibel dan adaptif, sehingga mampu bertahan dalam berbagai

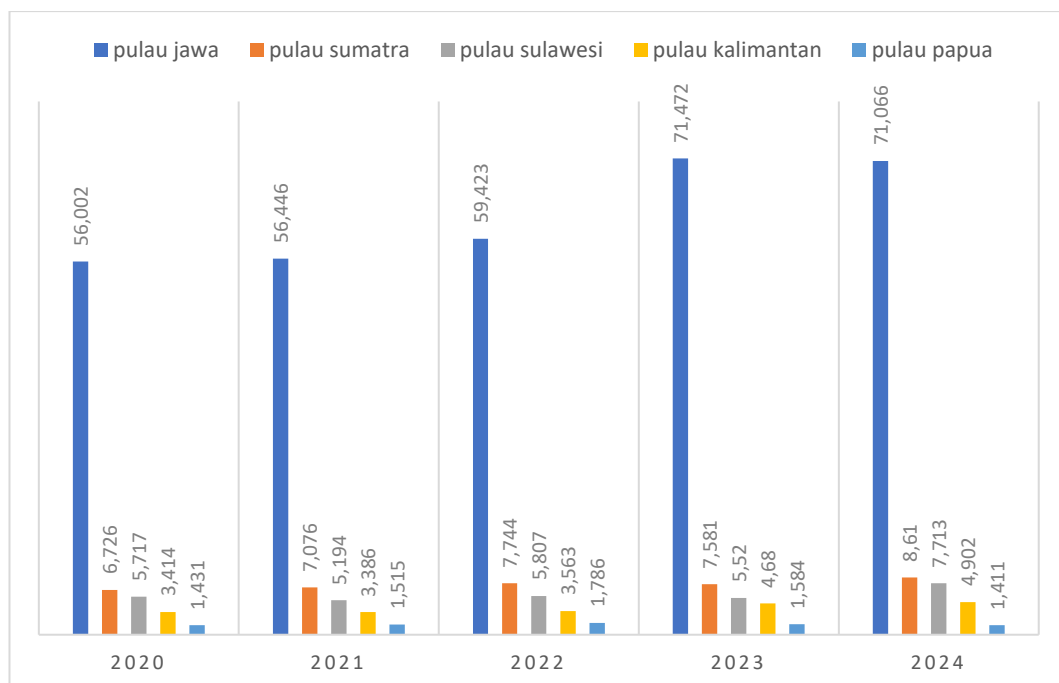
kondisi ekonomi serta menjadi penopang aktivitas produksi di tingkat lokal (Ariani et al., 2025).

Industri Mikro dan Kecil (IMK) memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui kontribusinya dalam penciptaan lapangan kerja serta kemampuannya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi ekonomi. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah unit Industri Mikro dan Kecil (IMK) serta meningkatnya nilai produksi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan *output* dan pendapatan daerah (Fika Chairunisa Azhari & Nuraini, 2024).

Menurut kementerian keuangan Peran pemerintah dalam industri mikro kecil adalah sebagai regulator, fasilitator, dan penyedia dukungan pembiayaan, pelatihan, serta perluasan akses pasar agar IMK mampu naik kelas dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Peran tersebut diwujudkan melalui kebijakan afirmatif seperti alokasi minimal 40% belanja pengadaan untuk produk Perusahaan mikro kecil, penyediaan skema pembiayaan bersubsidi (misalnya KUR), serta program pendampingan dan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing IMK di pasar domestik dan global (Ariyanti Lasmi, 2023).

Dalam mendukung pengembangan Industri Mikro dan Kecil (IMK), peran pemerintah diperlukan sebagai faktor pendukung yang menciptakan lingkungan Perusahaan kondusif. Namun, pada tingkat Perusahaan, peningkatan pendapatan IMK pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan pelaku Perusahaan dalam mengelola faktor-faktor produksi secara efisien.

Pendapatan merupakan indikator fundamental yang mengukur kemampuan produksi dan kesejahteraan ekonomi Perusahaan. Pendapatan tidak hanya mencerminkan volume produksi, tetapi juga efisiensi penggunaan faktor produksi dan kemampuan menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan. Pendapatan IMK dipengaruhi secara signifikan oleh tenaga kerja, modal, dan teknologi yang digunakan, sehingga pemahaman mendalam tentang interaksi faktor-faktor produksi sangat penting untuk meningkatkan kinerja IMK secara keseluruhan (Anna, 2024). Berikut adalah gambar rata – rata pendapatan Perusahaan antar pulau di Indonesia pada tahun 2020 – 2024.



Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah)

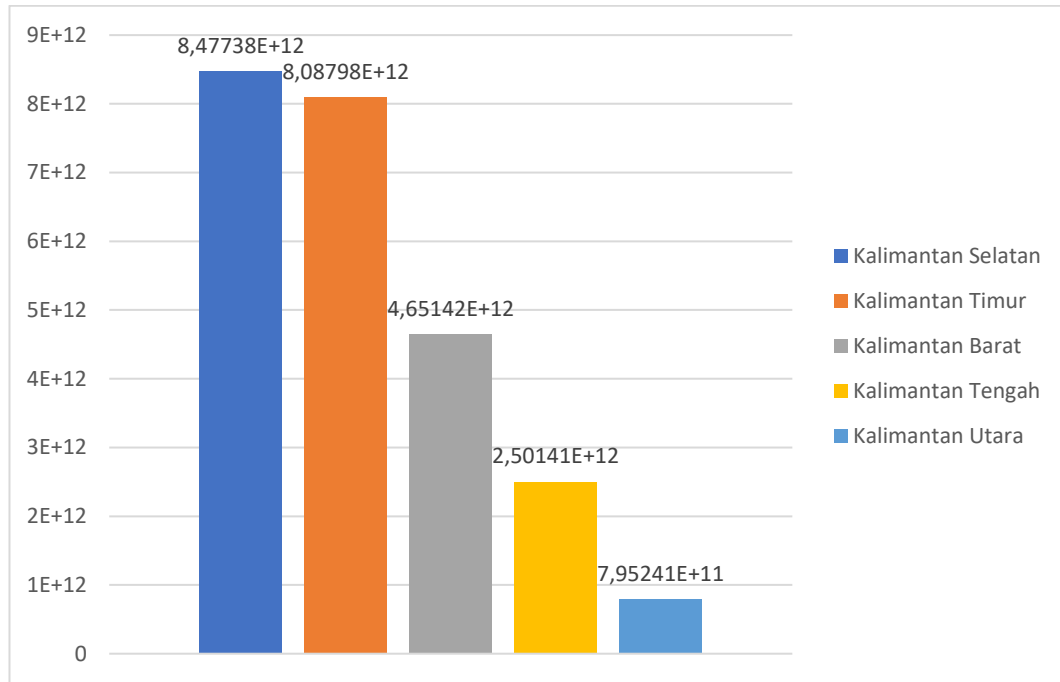
Gambar 1. 1 Rata – Rata Pendapatan Perusahaan IMK Antar Pulau Di Indonesia tahun 2020 – 2024 (Triliun Rupiah)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan Perusahaan Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia pada periode 2020 – 2024 masih menunjukkan

perbedaan yang cukup mencolok antar pulau. Pulau Jawa tercatat sebagai wilayah dengan rata-rata pendapatan IMK tertinggi dan cenderung mengalami peningkatan, dari sekitar Rp56 triliun pada tahun 2020 menjadi lebih dari Rp71 triliun pada tahun 2023, walaupun pada tahun 2024 terlihat adanya penurunan tipis. Wilayah lain seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua memiliki rata-rata pendapatan yang jauh lebih rendah, yakni hanya berada pada kisaran Rp 1 sampai 8 triliun. Secara spesifik, jika dibandingkan dengan Pulau Jawa yang menjadi barometer nasional, Pulau Kalimantan masih terjebak dalam kelompok wilayah dengan kontribusi pendapatan IMK yang relatif rendah dan stagnan. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya kesenjangan produktivitas dan hambatan struktural yang membuat kinerja IMK di Kalimantan belum mampu berkembang secara akseleratif.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah namun kontribusi sektor industrinya, khususnya pada skala mikro dan kecil, belum sinkron dengan kekayaan daerahnya. Rendahnya pendapatan ini mencerminkan bahwa nilai tambah yang diciptakan oleh pelaku usaha lokal di Kalimantan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi biaya *input* akibat inflasi, keterbatasan serapan tenaga kerja yang berkualitas, hingga belum optimalnya digitalisasi melalui penggunaan internet. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih komprehensif mengenai variabel-variabel tersebut guna memetakan solusi strategis dalam meningkatkan skala ekonomi IMK di Pulau Kalimantan. Gambar di bawah ini menyajikan data lebih rinci mengenai perbandingan pendapatan Perusahaan IMK

antar provinsi di Pulau Kalimantan pada tahun 2024 untuk melihat disparitas internal di dalam pulau tersebut.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 2 Pendapatan Perusahaan IMK di pulau Kalimantan tahun 2024 (Rupiah)

Gambar 1.2 menunjukkan adanya perbedaan pendapatan Industri Mikro dan Kecil (IMK) yang cukup tajam antar provinsi di Pulau Kalimantan. Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan pendapatan IMK paling tinggi, yakni sebesar 8.477.378.669.000 rupiah, disusul Kalimantan Timur sebesar 8.087.984.448.000 rupiah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedua provinsi ini memiliki kemampuan IMK yang relatif lebih baik dalam menghasilkan pendapatan dibandingkan wilayah lainnya. Di sisi lain, Kalimantan Barat berada pada posisi menengah dengan pendapatan sebesar 4.651.421.245.000 rupiah. Kalimantan Tengah hanya mencatat pendapatan sebesar 2.501.408.157.000 rupiah, dan

Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan pendapatan IMK paling rendah, yaitu 795.241.142.000 rupiah. Rendahnya pendapatan IMK di Kalimantan Utara mengindikasikan bahwa aktivitas IMK di wilayah tersebut masih terbatas, baik dari segi skala Perusahaan maupun jangkauan pasar.

Kesenjangan pendapatan antara provinsi dengan nilai tertinggi dan terendah menunjukkan bahwa perkembangan IMK di pulau Kalimantan belum berlangsung secara merata. Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan performa ekonomi antar provinsi, di mana sebagian daerah mampu mengembangkan sektor IMK secara lebih optimal, sedangkan daerah lain masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam meningkatkan pendapatan Perusahaan. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik struktur ekonomi wilayah, dukungan infrastruktur, serta kemampuan pelaku IMK dalam mengelola faktor produksi dan efisiensi kegiatan operasional.

Melihat adanya disparitas pendapatan IMK antar provinsi di pulau Kalimantan, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan IMK.

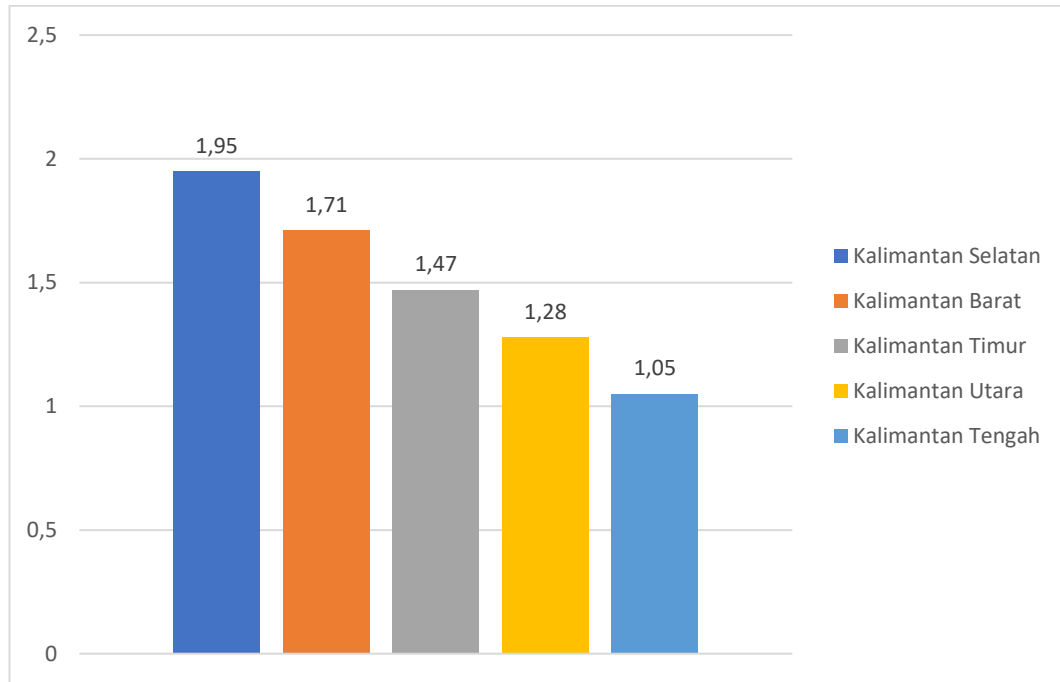
Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang mencerminkan kondisi perekonomian dan dapat mempengaruhi pendapatan Industri Mikro dan Kecil (IMK). Perubahan tingkat inflasi menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dapat berdampak pada aktivitas produksi serta kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Dalam kondisi tertentu, peningkatan inflasi dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan harga jual produk sehingga berdampak pada peningkatan

pendapatan, khususnya apabila permintaan terhadap barang dan jasa masih tetap ada.

Berdasarkan pendekatan teori Keynes, inflasi tidak selalu berdampak negatif, terutama ketika inflasi terjadi akibat meningkatnya permintaan agregat (*demand-pull inflation*). Dalam kondisi ini, kenaikan harga mencerminkan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Hal tersebut dapat mendorong peningkatan penjualan sehingga pendapatan perusahaan juga meningkat. Dengan demikian, inflasi dapat berkorelasi positif terhadap pendapatan, terutama ketika daya beli masyarakat masih relatif stabil.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lie & Patrias Anthoni, 2025) menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan pada sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kondisi ini terjadi karena perusahaan pada sektor tersebut umumnya memproduksi barang kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman yang permintaannya relatif stabil meskipun terjadi kenaikan harga akibat inflasi. Konsumen tetap melakukan pembelian walaupun harga meningkat, sehingga kenaikan harga jual tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Namun Penelitian yang dilakukan oleh (Rosa Del Yenni & idwar, 2019) menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan atau omset UMKM di Kota Padang. Hal ini terjadi karena meningkatnya inflasi menyebabkan kenaikan harga bahan baku dan biaya produksi sehingga harga jual produk ikut meningkat. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang kemudian menurunkan penjualan dan pendapatan UMKM.

Gambar di bawah menyajikan perbandingan inflasi IMK antar provinsi di Pulau Kalimantan pada tahun 2024.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 3 Inflasi IMK di pulau Kalimantan tahun 2024 (Persen)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Pulau Kalimantan pada tahun 2024 mengalami perbedaan di setiap provinsi. Kalimantan Selatan tercatat memiliki tingkat inflasi tertinggi sebesar 1,95 persen, kemudian diikuti oleh Kalimantan Barat sebesar 1,71 persen dan Kalimantan Timur sebesar 1,47 persen. Tingginya tingkat inflasi pada ketiga provinsi tersebut mencerminkan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang relatif lebih besar dibandingkan provinsi lainnya. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi maupun tekanan terhadap harga kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kalimantan Utara memiliki tingkat inflasi sebesar 1,28 persen dan Kalimantan Tengah mencatat tingkat inflasi terendah sebesar 1,05

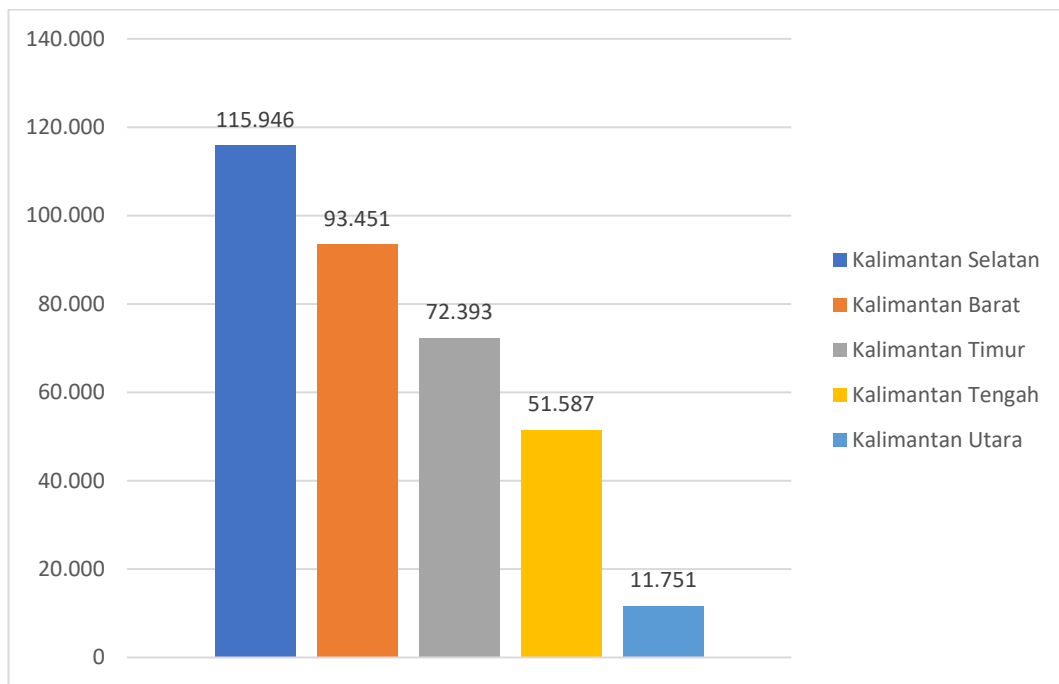
persen. Rendahnya inflasi pada kedua provinsi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa relatif lebih terkendali dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Perbedaan tingkat inflasi ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan dinamika harga antar provinsi di Kalimantan masih bervariasi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa inflasi tidak hanya mencerminkan perubahan harga barang dan jasa, tetapi juga berkaitan dengan kondisi perekonomian daerah, tingkat permintaan masyarakat, serta kelancaran distribusi barang. Provinsi dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi cenderung mengalami peningkatan permintaan atau kenaikan biaya produksi, sedangkan provinsi dengan tingkat inflasi yang lebih rendah menunjukkan kondisi harga yang relatif stabil. Perbedaan tingkat inflasi tersebut dapat mempengaruhi aktivitas produksi dan pendapatan Industri Mikro dan Kecil (IMK) di masing-masing provinsi di Pulau Kalimantan.

Berikutnya faktor yang diperkirakan dapat memengaruhi pendapatan Perusahaan IMK adalah tenaga kerja. Dalam teori produksi, tenaga kerja merupakan *input* utama yang berperan langsung dalam menghasilkan *output* sekaligus menciptakan nilai tambah. Melalui pendekatan fungsi produksi, seperti model Cobb-Douglas, peningkatan tenaga kerja pada umumnya akan memperluas kapasitas produksi sehingga *output* yang dihasilkan meningkat dan pada akhirnya dapat mendorong kenaikan pendapatan Perusahaan. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kemampuan kerja yang baik cenderung lebih efisien, mampu menekan pemborosan, menjaga mutu produk, serta mempercepat proses produksi.

Secara empiris, keterkaitan tenaga kerja dengan pendapatan IMK dapat dijelaskan melalui peningkatan produktivitas. Penambahan tenaga kerja yang diikuti dengan kemampuan kerja yang memadai memungkinkan IMK meningkatkan intensitas produksi, memperluas kapasitas layanan, serta mengembangkan variasi produk. Hal tersebut membuat Perusahaan lebih siap menghadapi perubahan permintaan, khususnya pada sektor industri pengolahan yang relatif bergantung pada tenaga kerja untuk menjaga kelancaran proses produksi.

Penelitian (Irpan Saputra & Edi Irawan, 2024) menemukan bahwa tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan serta *output* Industri Mikro dan Kecil (IMK). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang baik cenderung lebih produktif, efisien dalam proses produksi, serta mampu beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar dan perkembangan teknologi. Namun, penelitian (Afrisonia & Gunawan, 2022) menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dapat menurunkan pendapatan karena meningkatnya biaya operasional dan menurunnya efisiensi usaha. Gambar di bawah menyajikan perbandingan tenaga kerja Perusahaan IMK antar provinsi di Pulau Kalimantan pada tahun 2024.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 4 Tenaga kerja IMK di pulau Kalimantan tahun 2024 (Jiwa)

Gambar 1.4 menunjukkan adanya perbedaan tenaga kerja IMK antar provinsi di Pulau Kalimantan pada tahun 2024. Kalimantan Selatan mencatat tenaga kerja IMK paling tinggi sebesar 115.946 jiwa, kemudian diikuti Kalimantan Barat sebesar 93.451 jiwa dan Kalimantan Timur sebesar 72.393 jiwa. Selanjutnya, Kalimantan Tengah berada pada angka 51.587 jiwa, sedangkan Kalimantan Utara menunjukkan tenaga kerja paling rendah, yaitu 11.751 jiwa. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perkembangan IMK dalam penggunaan tenaga kerja di Kalimantan belum berlangsung secara merata, karena beberapa provinsi memiliki basis tenaga kerja IMK yang lebih besar dibandingkan provinsi lainnya. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan skala Perusahaan, karakteristik struktur ekonomi daerah, serta tingkat perkembangan sektor industri mikro dan kecil di masing-masing provinsi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja IMK antar provinsi belum tersebar secara merata. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya perbedaan kapasitas produksi di masing-masing wilayah yang berpotensi memengaruhi tingkat pendapatan IMK. Provinsi dengan tenaga kerja IMK yang lebih besar umumnya memiliki peluang lebih tinggi untuk meningkatkan *output* dan memperluas skala operasional, sedangkan provinsi dengan tenaga kerja yang lebih rendah cenderung menghadapi keterbatasan dalam proses produksi maupun pengembangan Perusahaan. Oleh sebab itu, analisis mengenai keterkaitan tenaga kerja dengan pendapatan IMK menjadi penting untuk memahami perbedaan pendapatan IMK antar provinsi di Kalimantan.

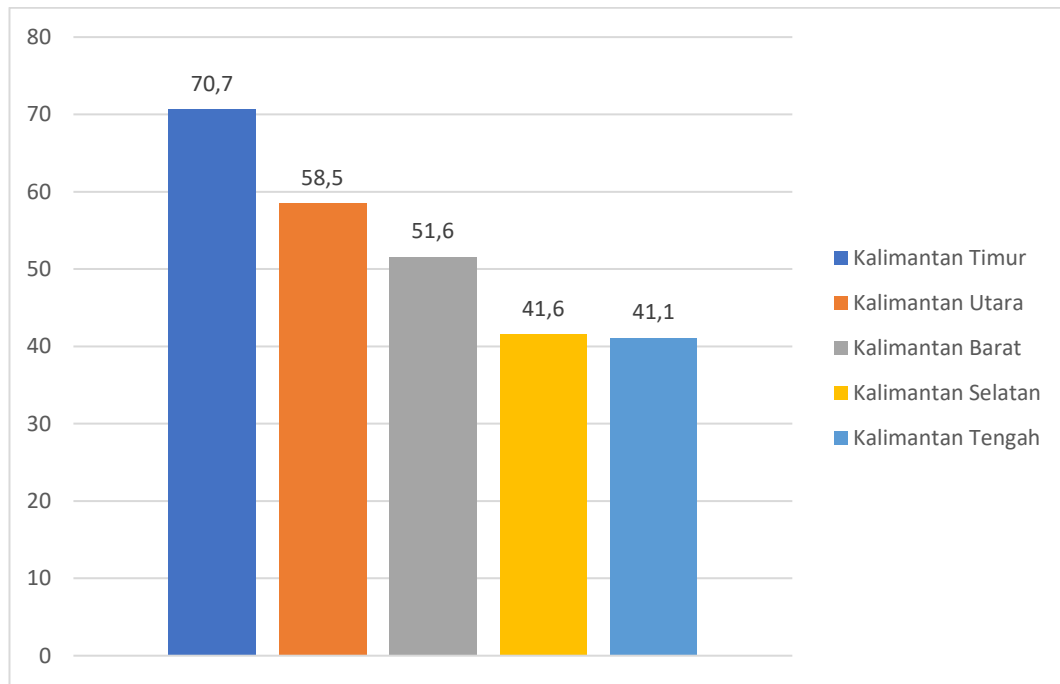
Selanjutnya faktor yang dapat memengaruhi pendapatan Perusahaan Industri Mikro dan Kecil (IMK) adalah penggunaan internet. Dalam perspektif teori produksi, internet dapat dipahami sebagai wujud kemajuan teknologi yang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi sekaligus mendukung aktivitas pemasaran. Melalui pendekatan fungsi produksi, seperti model Cobb–Douglas, teknologi berperan sebagai faktor yang meningkatkan efisiensi total produksi (*total factor productivity*), sehingga Perusahaan mampu meningkatkan *output* tanpa harus menambah *input* secara sebanding. Bagi pelaku IMK, penggunaan internet baik untuk pemasaran secara daring, komunikasi Perusahaan, maupun memperoleh informasi mengenai pasar dan bahan baku dapat memperkuat kapasitas Perusahaan dan mendorong peningkatan pendapatan.

Secara empiris, keterkaitan antara penggunaan internet dan pendapatan IMK dapat dijelaskan melalui perbaikan efektivitas pemasaran dan perluasan akses pasar. IMK yang memanfaatkan internet cenderung memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau konsumen di luar wilayah Perusahaannya, memperluas jaringan pemasaran, serta merespons perubahan permintaan pasar dengan lebih cepat. Kondisi ini menjadi penting mengingat masih banyak IMK di Indonesia yang menghadapi keterbatasan dalam kegiatan pemasaran. Kehadiran internet membantu mengurangi hambatan geografis dan keterbatasan informasi, sehingga berpotensi meningkatkan volume penjualan dan nilai transaksi, khususnya pada sektor industri pengolahan yang semakin terdorong untuk mengikuti perkembangan teknologi digital.

Hasil penelitian (Puspa Negara & Monika, 2020) menunjukkan bahwa penggunaan internet memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan IMK di Indonesia. penelitian tersebut menemukan bahwa peningkatan persentase IMK yang memanfaatkan internet secara nyata berkorelasi dengan peningkatan pendapatan Perusahaan. Koefisien variabel penggunaan internet yang bernilai positif dan signifikan mengindikasikan bahwa semakin luas adopsi internet oleh pelaku IMK, semakin besar pula pendapatan yang dapat dihasilkan.

Pemanfaatan internet memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, memanfaatkan platform digital untuk promosi, serta memperoleh informasi pasar secara lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, penggunaan internet tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai faktor strategis yang mampu meningkatkan kinerja dan pendapatan IMK

secara berkelanjutan. Gambar di bawah menyajikan perbandingan penggunaan internet IMK antar provinsi di Pulau Kalimantan pada tahun 2024.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 5 Penggunaan Internet IMK di pulau Kalimantan tahun 2024 (Persen)

Gambar 1.5 memperlihatkan bahwa tingkat penggunaan internet oleh Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Pulau Kalimantan pada tahun 2024 berbeda antar provinsi. Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan persentase penggunaan internet tertinggi, yaitu sebesar 70,7 persen. Selanjutnya, Kalimantan Utara mencatat persentase sebesar 58,5 persen, diikuti Kalimantan Barat sebesar 51,6 persen. Adapun Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menunjukkan tingkat penggunaan internet yang relatif lebih rendah, masing-masing sebesar 41,6 persen dan 41,1 persen. Perbedaan tersebut mencerminkan bahwa adopsi internet oleh

IMK di Kalimantan belum sepenuhnya merata, dengan tingkat pemanfaatan yang masih bervariasi antar wilayah.

Ketimpangan dalam penggunaan internet ini mengindikasikan adanya perbedaan kondisi dan kesiapan digital di masing-masing provinsi. Wilayah dengan tingkat penggunaan internet yang lebih tinggi cenderung didukung oleh ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang lebih baik serta akses pasar yang lebih luas, sehingga mendorong pelaku IMK untuk memanfaatkan internet dalam kegiatan Perusahaannya. Sebaliknya, provinsi dengan tingkat penggunaan internet yang lebih rendah kemungkinan masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi infrastruktur, literasi digital pelaku Perusahaan, maupun karakteristik pasar yang masih bersifat lokal. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kinerja dan pendapatan IMK, melihat pemanfaatan internet dapat membantu pelaku Perusahaan memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan efisiensi operasional, dan merespons permintaan pasar secara lebih cepat. Oleh karena itu, kajian mengenai penggunaan internet menjadi relevan untuk menjelaskan perbedaan pendapatan IMK antar provinsi di Pulau Kalimantan.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan IMK/UMKM, seperti Inflasi, tenaga kerja, dan penggunaan internet sebagai indikator perkembangan Perusahaan, sebagian besar studi tersebut masih memiliki keterbatasan. Penelitian yang tersedia umumnya dilakukan pada lingkup wilayah tertentu, misalnya kabupaten atau kota, menggunakan data *cross-section* dalam satu periode pengamatan, serta lebih banyak membahas UMKM secara umum tanpa memberikan perhatian khusus pada

Industri Mikro dan Kecil (IMK) sebagai unit analisis yang lebih spesifik. Akibatnya, pemahaman mengenai variasi dan dinamika pendapatan IMK antar wilayah dalam jangka waktu yang lebih panjang masih belum ter gambarkan secara komprehensif, terutama pada level regional Pulau Kalimantan.

Kesenjangan penelitian ini semakin terlihat ketika dikaitkan dengan kondisi empiris Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Pulau Kalimantan. Data menunjukkan adanya perbedaan pendapatan IMK yang cukup mencolok antar provinsi, di mana Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur cenderung mencatat tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Perbedaan pendapatan tersebut juga sejalan dengan perbedaan inflasi, tenaga kerja, serta tingkat penggunaan internet oleh IMK yang belum merata di setiap provinsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa karakteristik dan kapasitas Perusahaan IMK antar wilayah di Pulau Kalimantan memiliki perbedaan yang dapat memengaruhi kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami peran faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan Perusahaan, khususnya inflasi, tenaga kerja, dan penggunaan internet, dalam membentuk pendapatan IMK di Pulau Kalimantan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, tenaga kerja, dan penggunaan internet terhadap pendapatan Perusahaan Industri Mikro dan Kecil dengan menggunakan pendekatan data panel pada periode 2017–2024. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pendapatan IMK serta perbedaan antar provinsi di Pulau Kalimantan dari waktu ke waktu. Dengan

demikian, penelitian ini mengangkat judul **Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, dan Penggunaan Internet terhadap Pendapatan Perusahaan (Studi pada Industri Mikro dan Kecil di Pulau Kalimantan Tahun 2017–2024).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, dan Penggunaan Internet secara parsial terhadap pendapatan Perusahaan IMK di Pulau Kalimantan pada tahun 2017–2024?
2. Bagaimana Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, dan Penggunaan Internet secara bersama terhadap pendapatan Perusahaan IMK di Pulau Kalimantan pada tahun 2017–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Menganalisis Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, dan Penggunaan Internet secara parsial terhadap pendapatan Perusahaan IMK di Pulau Kalimantan pada tahun 2017–2024.
2. Menganalisis Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, dan Penggunaan Internet secara bersama terhadap pendapatan Perusahaan IMK di Pulau Kalimantan pada tahun 2017–2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian tentang Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, dan Penggunaan Internet terhadap pendapatan Perusahaan IMK di Pulau Kalimantan, berikut adalah kegunaan ilmu pembangunan dan kegunaan praktis penelitian ini:

1.4.1 Kegunaan Ilmu Pembangunan

Penelitian ini menegaskan peran Industri Mikro dan Kecil (IMK) sebagai salah satu pendorong pembangunan ekonomi melalui kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan pengembangan Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Pulau Kalimantan. Temuan penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan, khususnya terkait pengendalian inflasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pemerataan penggunaan internet bagi pelaku IMK. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat mendukung kebijakan pemerataan perkembangan IMK antar provinsi di Pulau Kalimantan, mengingat masih terdapat kesenjangan pendapatan dan aktivitas usaha di berbagai wilayah Bagi Pelaku Perusahaan Industri Mikro dan Kecil (IMK)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi pelaku Industri Mikro dan Kecil (IMK) mengenai peran tenaga kerja, dan

penggunaan internet dalam memengaruhi pendapatan Perusahaan. Pemahaman tersebut diharapkan mendorong pelaku IMK untuk mengelola tenaga kerja secara lebih produktif, memanfaatkan internet secara optimal guna meningkatkan daya saing dan kinerja Perusahaan.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sektor IMK, khususnya dalam kajian ekonomi pembangunan dan ekonomi regional. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi studi lanjutan dengan menambahkan variabel lain atau memperluas wilayah dan periode penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pendapatan IMK.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 5 provinsi di pulau Kalimantan, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pemilihan wilayah penelitian didasarkan pada kondisi Pulau Kalimantan yang memiliki tingkat konsentrasi Industri Mikro dan Kecil (IMK) relatif rendah dibandingkan wilayah lain di Indonesia, sehingga relevan untuk menggambarkan dinamika IMK di wilayah dengan aktivitas usaha yang masih terbatas.

